

SKRIPSI

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMULIHAN PEMBANGUNAN FISIK DAERAH PASCA GEMPA
(STUDI DI DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

***THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD'S LEADERSHIP IS TO INCREASE
COMMUNITY PARTICIPATION IN THE RECOVERY OF POST-
EARTHQUAKE PHYSICAL DEVELOPMENT
(STUDI DI DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN
LOMBOK BARAT)***



OLEH

**YOGI ALFIRA
NIM. 21511A0076**

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTERASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

SKRIPSI

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMULIHAN PEMBANGUNAN FISIK DAERAH PASCA GEMPA
(STUDI DI DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

***THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD'S LEADERSHIP IS TO INCREASE
COMMUNITY PARTICIPATION IN THE RECOVERY OF POST-
EARTHQUAKE PHYSICAL DEVELOPMENT
(STUDI DI DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN
LOMBOK BARAT)***



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

OLEH

YOGI ALFIRA
NIM. 21511A0076

**JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTERASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Ini Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Di Ujikan Ke Panitia Ujian

Skripsi Program Studi Administrasi Publik Pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 3 Februari 2020

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



(Drs. H. Mustamin H. Idris, MS)
NIP. 196412102005011003

Dosen Pembimbing II



(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)
NIDN. 0822048901

Mengetahui,

Program Studi Administasi Publik

Ketua



(Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP)
NIDN. 0822048901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMULIHAN PEMBANGUNAN FISIK DAERAH PASCA GEMPA
(STUDI DI DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Oleh :

YOGI ALFIRA
NIM. 21511A0076

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Jurusan Urusan Publik Telah disetujui Oleh Tim Penguji
Pada tanggal seperti yang tertera di bawah ini:
Mataram, 3 Februari 2020

Tim Penguji :

1. **Drs. H. Mustamin H. Idris. MS**
NIP. 196412102005011003



Ketua

2. **Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP**
NIDN. 0822048901



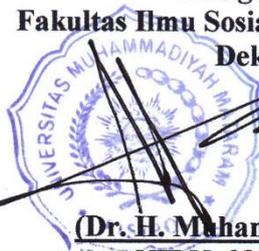
Anggota

3. **Drs. Mintasrihardi, MH**
NIDN. 0530016101



Anggota

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




(Dr. H. Muhamad Ali, M.Si)
NIDN. 0806066801

2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGI ALFIRA
NIM : 21511A0076
Tempat/Tgl Lahir : TALIWANG, 26 AGUSTUS 1997
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 087 855 862 775
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peranan kepemimpinan kepala Desa untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyaliran pembangunan fisik daerah pasca gempa (Studi Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 12 Maret 2020

Penulis



NIM. 21511A0076

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Yogi Alfira
Nim : 21511A0076
Alamat : Ampenan Jln. Arwana No.45 Mataram

Memang benar skripsi yang berjudul *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemulihan Pembangunan Fisik Daerah Pasca Gempa di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat* adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya ataupun pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacukan sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya termasuk meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Januari 2020



YOGI ALFIRA
21511A0076

RIWAYAT HIDUP



Yogi Alfira yang biasa dipanggil YOGI, lahir di Desa Manala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 26 Agustus 1997. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Ayahanda Lutfi Fadli dan Ibunda Rahmaniar ,anak pertama dari 4 bersaudara, .Penulis memula ipendidikan di SDN 2 Tarusa pada tahun 2002 hingga tahun 2008, di tahun yang sama lalu melanjutkan pendidikan di MTsN 1 ALAS dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 ALAS dan tamat pada tahun 2015. Melalui penerimaan mahasiswa jalur tes pada tahun 2015 penulis berhasil lulus seleksi dan terdaftar sebaga mahasiswa jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

MOTTO

**Kebahagiaann adalah sesuatu yang dapat
mengantarkan kepada kesuksesan (surga)**

(Ali Bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kupersembahkan kehadirat ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, serta Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan petunjuk dan menuntun kita semua kejadian yang benar sampai hari ini aamiin.

- ❖ Kedua orangtuaku (bapak Lutfi Fadli dan ibu Rahmaniar) terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta doa yang selalu tercurahkan untuk keberhasilanku serta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan material terhadap kegiatan penulisan skripsi ini dalam menggapai cita-cita.
- ❖ Kepada dosen pembimbing yang ikut membantu membimbing saya dalam melengkapi skripsi ini.
- ❖ Adik-adikku tercinta (Intan Aprilia, Wahyudi Fadli dan Putri Fira Azzahra) yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat untuk keberhasilanku.
- ❖ Desi Siska Dwi Yanti yang selalu memberikan semangat serta dukungan positif terhadap keberhasilanku.
- ❖ Segenap sahabat-sahabat seperjuanganku angkatan 2015, (Rahmatullah, Desi Siska Dwi Yanti, Rendra Pratama, Rijal Thabrani, Mahardhika, Syukron Jazila) yang telah memberikan gagasan-gagasan atau saran-saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar, serta buat Almanaterku yang telah membanggakanku.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan atas rahmat, taufik, dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yang menjadi salah satu syarat dan kewajiban setiap mahasiswa untuk mencapai program strata satu (S-1)

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah kebenaran di muka bumi dan atas peradaban yang dilahirkannya.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini banyak hal yang tercurahkan, mulai dari waktu, tempat, hal-hal yang bersifat prinsipil, pikiran, dan kontribusi yang tak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali M.Si Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat. S.AP., M.AP. Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs. H. Mustamin H. Idris, M.S dan Rahmad Hidayat. S. AP., M.AP. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah banyak memberi ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Kepada Bapak H.M. Nur Taufik, Spd.i selaku Kepala Desa Batulayar beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data selama melakukan penelitian.
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas bantuannya baik berupa materi ataupun spiritual sehingga dapat memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan atau membaca skripsi ini pada umumnya.

Mataram, Januari 2020
Penulis

YOGI ALFIRA
21511A0076

DAFTAR ISI

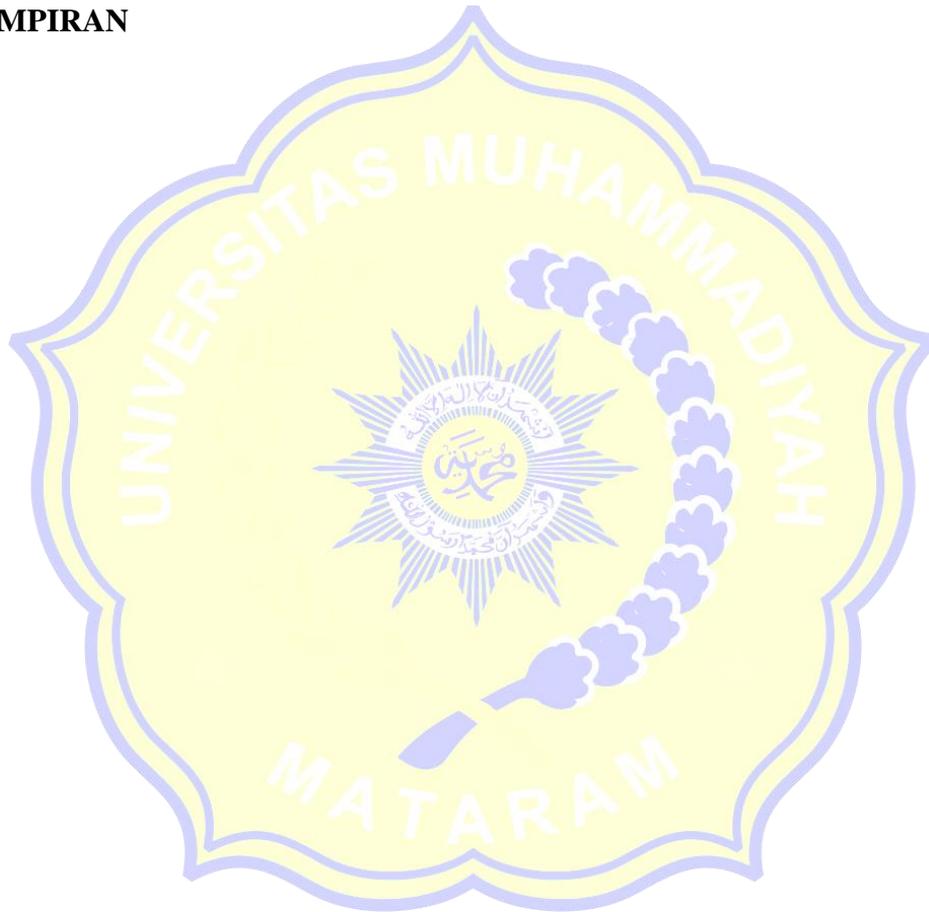
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN SURAT ILMIAH PERNYATAAN PERSETUJUAN	
PUBLIKASI KARYA	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5

1.4.2	Manfaat Praktis	5
1.4.3	Manfaat akademis	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....		7
2.1	Pemerintah Desa.....	7
2.2	Konsep Pembangunan	13
2.3	Tujuan Pemerintah	19
2.4	Cara Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	22
2.5	Kepemimpinan	32
2.6	Faktor Penghambat Dan Pendukung.....	39
BAB III. METODE PENELITIAN		41
3.1	Jenis Penelitian.....	41
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian	41
3.3	Penentuan Informan	42
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6	Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		47
4.1	Profil desa	47
4.2	Peranan kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	51
4.3	Faktor penghambat dan pendukung dalam pemulihan pembangunan fisik daerah pasca gempa	70

BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	79

DAFTAR VPUSTAKA

LAMPIRAN

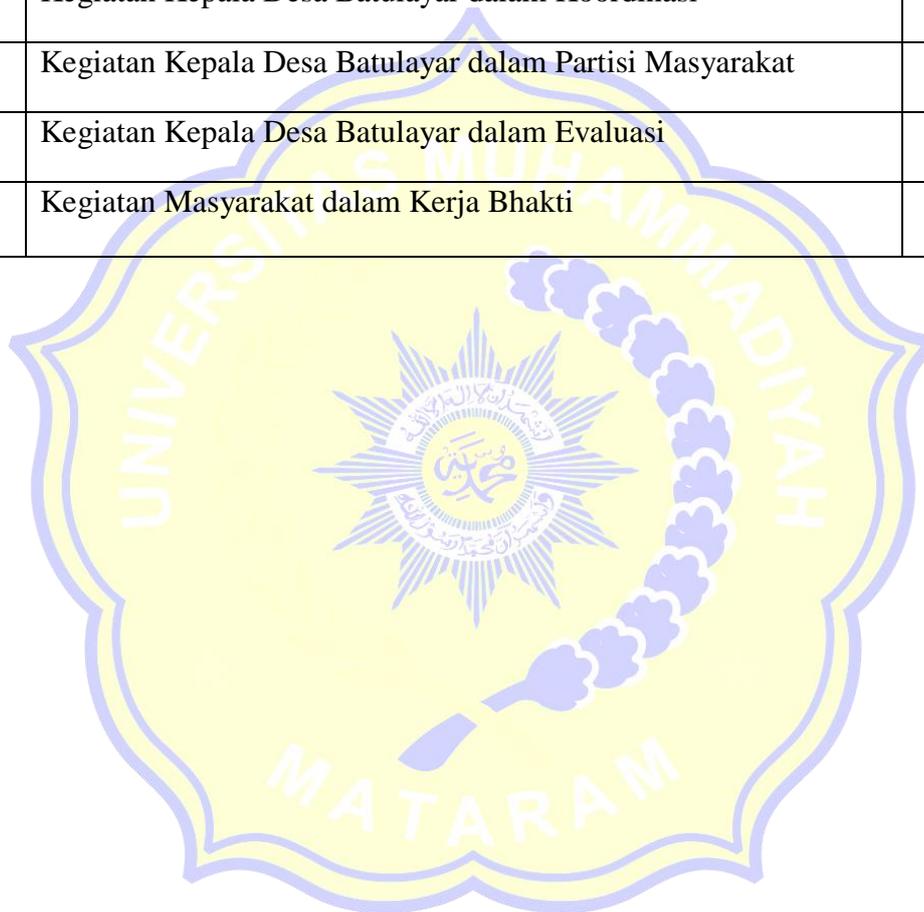


DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HAL
1.	Kepekaan Kepala Desa terhadap lingkunganya	59
2.	Keteladanan Kepala Desa dalam lingkunganya	60
3.	sikap setia Kepala Desa pada janjinya	61
4.	Kemampuan Kepala Desa mengambil keputusan	63
5.	Kemampuan Kepala Desa melaksanakan potensi masyarakat	64
6.	Kemampuan Kepala Desa melaksanakan tugas pemerintah	65
7.	Kemampuan Kepala Desa melaksanakan koordinasi	66
8.	Melaksanakan Kepala Desa tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya	68

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
1.	Kegiatan Kepala Desa Batulayar dalam Pemberian Motivasi	54
2.	Kegiatan Kepala Desa Batulayar dalam Koordinasi	55
3.	Kegiatan Kepala Desa Batulayar dalam Partisi Masyarakat	56
4.	Kegiatan Kepala Desa Batulayar dalam Evaluasi	57
5.	Kegiatan Masyarakat dalam Kerja Bhakti	71



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 LEBAR KONSULTASI

LAMPIRAN 2 BERITA ACARA

LAMPIRAN 3 SURAT IZIN PENELITIAN

LAMPIRAN 4 SURAT SURAT BALESAN PENELITIAN

LAMPIRAN 5 PEDOMAN WAWNCARA

LAMPIRAN 6 FOTO DOKUMENTASI



ABSTRAK

PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN PEMBANGUNAN FISIK DAERAH PASCA GEMPA (STUDI DI DESA BATULAYAR KECAMATAN BATULAYAR KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Yogi Alfira¹, Drs. H. Mustamin H. Idris, MS², Rahmad Hidayat, S.AP.,M.AP³

¹Mahasiswa

²Pembimbing Utama

³Pembimbing Pendamping

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Batulayar, bertujuan untuk mengetahui peranan kepemimpinan Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik pasca gempa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, untuk analisis kualitatif menggunakan data primer yang bersumber dari informan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, sedangkan analisis kuantitatif (prosentase baris) menggunakan data primer yang bersumber dari 110 orang responden (masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparat desa).

Hasil penelitian, bahwa peranan kepemimpinan Kepala Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik pasca gempa, meliputi 8 indikator yaitu kepekaan terhadap lingkungan, keteladanan, kesetiaan pada janjinya, kemampuan mengambil keputusan, kemampuan menggerakkan potensi masyarakat, kemampuan melaksanakan tugas pemerintah, kemampuan melaksanakan koordinasi dan kemampuan melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawab berada pada kategori "**Cukup Baik**"(72,16 %).

Meskipun ada beberapa factor penghambat terkait peranan kepemimpinan Kepala Desa, antara lain : masih terbatas sarana dan prasarana serta masih terdapat visi-misi yang belum terealisasi. Akan tetapi juga terdapat sejumlah faktor pendukung, anantara lain : tokoh masyarakat setempat aktif memberikan masukan / saran untuk perbaikan dan koordinasi antara institusi terlaksana secara intensif dalam penanganan berbagai masalah di desa.

Kata kunci : Peranan, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

This research has been carried out in Batulayar Village, aiming to find out the leadership rôle of the village head to increase community participation in post-earthquake physical development. Data analysis techniques used in this study are qualitative and quantitative analysis techniques. Qualitative analysis uses primary data sourced from informants of village heads and village secretaries, while quantitative analysis (percentage of rows) uses primary data sourced from 110 respondents consisting of community members, community leaders, and village officials.

The results showed that the leadership role of the village head to increase community participation in post-earthquake physical development included eight indicators, namely sensitivity to the environment, example, loyalty to his promises, ability to make decisions, ability to mobilize community potential, ability to carry out government tasks, ability to carry out coordination, and the ability to carry out tasks that have become the responsibility is in the category of "good enough" (72,16%).

However, there are several inhibiting factors related to the leadership role of the village head, including the limited facilities and infrastructure as well as the vision and mission that have not yet been realized. However, there are also a number of supporting factors, including local community leaders actively providing input / suggestions for improvement, and coordination between institutions is carried out intensively in handling various problems in the village.

Keywords: Role, Leadership, Community Participation.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu peran dari pemerintah adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan. Desa menurut Widjaja (2003 : 03) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen dari proses pembangunan desa, oleh karena itu perlu distimulasi terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan

adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan.

Saat ini salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan Peranan kepemimpinan yang baik bagi warga masyarakat desa. Peranan seorang pemimpin dalam desa sangatlah penting demi membangun partisipasi masyarakat, oleh karena itu pemimpin sangatlah berpengaruh dalam upaya membangun desa. Menurut Wahjosumidjo (1987:11) pengertian kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti:

1. Kepribadian (*personality*)
2. Kemampuan (*ability*)
3. Kesanggupan (*capability*)

Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut dan situasi.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi peranan kepemimpinan dalam suatu pembangunan desa yaitu, demi kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan pedesaan ditentukan oleh beberapa hal diantaranya keterlibatan masyarakat dan kemampuan serta keterampilan pemimpin-pemimpinnya di dalam menggerakkan semangat pembangunan. Selain peran kepala desa sebagai pemimpin formal, di Desa Batulayar Kecamatan Lombok Barat terdapat pemimpin informal yang sering disebut kepala adat yang sangat pengaruh terhadap pembangunan desa. Selain

sebagai pemimpin adat yang menjaga dan menegakkan nilai-nilai adat tradisional yang diyakini kebenarannya, seorang kepala desa juga berperan dalam membantu aparat pemerintah desa dan kecamatan (pemimpin formal) guna membina dan meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan.

Peranan kepemimpinan kepala desa untuk melakukan partisipasi desa pasca gempa, oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu membawa masyarakat bangkit pasca trauma gempa demi membangun kembali rasa partisipasi dalam diri masyarakat sehingga pembangunan fisik bisa direalisasikan. Gempa atau sisme banyak diartikan getaran atau guncangan yang timbul dipermukaan bumi yang terjadi karena adanya pergerakan lempengan bumi. Gempa bumi juga diartikan sebagai pergeseran lapisan bumi secara tiba-tiba yang berasal dalam bumi (Katili J.A dan Marks, 1962:45). Karena gempa bumi dikatakan bersumber dari dalam bumi atau lapisan bawah bumi berarti gempa bumi adalah getaran pada kulit bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam bumi.

Di Desa Batulayar terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik namun pelaksanaan proses pembangunan secara umum termasuk dalam tingkat tokenisme. Tingkat Tokenisme (Tingkah laku positif) merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang bersifat simbolik, dapat terlihat dari upaya penyampaian informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, kesempatan bagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang telah terlaksana di Desa masih belum

mencapai substansi pembangunan partisipatif baik itu dalam tahapan kehadiran dalam forum, penyaluran ide dan gagasan, penetapan pembangunan, sampai pada tahap evaluasi dan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN PEMBANGUNAN FISIK DAERAH PASCA GEMPA (STUDI DESA BATULAYAR)”**.

2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk peranan kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik daerah pasca gempa di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemulihan pembangunan fisik daerah pasca gempa di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka,

1. Untuk mengetahui bentuk peranan pemimpin kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pemulihan pembangunan fisik daerah pasca gempa di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian Peranan kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemulihan pembangunan fisik daerah pasca gempa adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

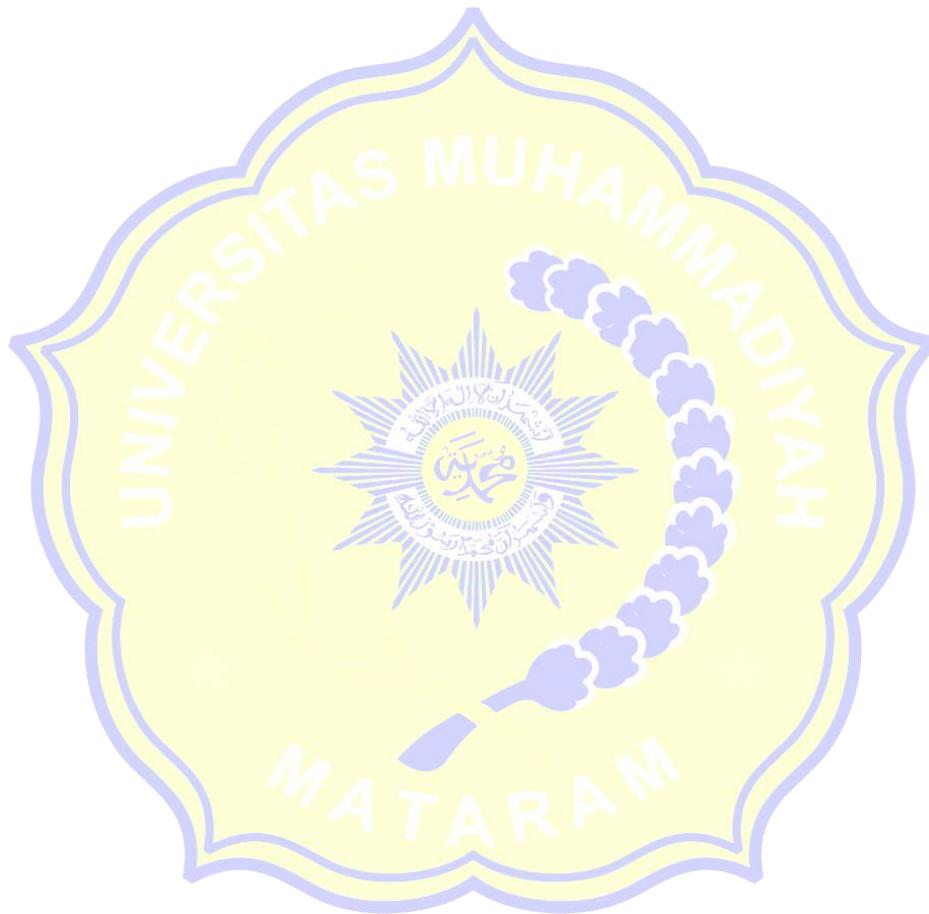
Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu administrasi publik khususnya mengenai teori kepemimpinan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan kepala desa yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mampu dalam pemulihan pembangunan fisik daerah pasca gempa di Desa Batulayar

3. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar S1 program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Area.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Pemerintah Desa

1. Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin

Berbicara tentang pemimpin, maka yang termasuk pemimpin bukan hanya semata-mata ditujukan kepada pemerintah saja, namun yang dikatakan sebagai pemimpin adalah semua orang-orang yang disertai tugas dan tanggung jawab seperti halnya bapak/ibu dalam rumah tangga pun juga disebut pemimpin. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas maka Kepala Desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Atmosudirdjo (2002 : 212) bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

- a. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari pada orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban.
- b. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.

- c. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
- d. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan Kepala Desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasilais sejati, bukanlah kepemimpinan yang bersifat ogal-ogalan, akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat merusak. Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengannya, maka seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu, atau diberikan wewenang formil tertentu.

Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan Kepala Desa harus peka terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru.

2. Kepala Desa dan Peranannya

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap Desa diluar Desa gineologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau kerana transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten / Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa,

tugas pembantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan galian c dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan Kepala Desa dalam menjalankan roda Pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menggerakkan potensi masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- c. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.
- d. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung

jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan.

Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Sebagai prinsip pembangunan Desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya pun harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan Desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan Kepala Desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya.

Adapun contoh penelitian yang terdahulu :

Penelitian yang pertama adalah yang dilakukan oleh Suwanti, (2016) penelitian yang berjudul: “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur”, penelitian ini melihat dampak peran Kepala Desa yang selalu dilakukan dengan tujuan bahwa hal tersebut memberikan kesadaran

kepada masyarakat desa khususnya Desa Ngayau akan pentingnya kerja sama dalam sebuah proses pembangunan. Selain itu, dengan hal tersebut tentunya mendapat respon yang positif dari masyarakat Desa Ngayau karena dorongan dan bimbingan dari Kepala Desa sangat diperlukan dan dinantikan oleh masyarakat desa.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Wayan Mahayan, (2013) dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur”, penelitian ini melihat dampak peran Kepala Pemerintah desa dalam hal ini sebagai motivator yang telah bekerja sama dengan masyarakat dalam hal yaitu bersama-sama meningkatkan pembangunan desa dengan cara memberikan dorongan-dorongan kepada warga.

2.2 Konsep Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. Menurut Siagian (2006) bahwa proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dari perubahan berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah No 43 Tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan yang di susun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan

rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dari pengertian tersebut terkandung suatu maksud adanya usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui yang sudah ada menjadi lebih baik, baik secara lahiriah maupun secara bathiniah kita ingin menikmati dan mengenyam hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan merupakan cakupan yang luas dimana terdapat berbagai hambatan dan bukan dengan cara otomatis berjalan dengan sendirinya.

Dalam bidang ekonomi harus ada kesempatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, koperasi dan swasta sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan usaha yang baik, diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang menunjang pembangunan dibidang lainnya serta menciptakan lapangan kerja yang luas.

Pembangunan ke seluruh wilayah pada Negara Republik Indonesia maka perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan kelurahan yang lebih diarahkan pada perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dan menggalangi masalah yang ada. Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan rakyat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan Trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang sehat dan dinamis. Dengan demikian pembangunan diprioritaskan pada bidang ekonomi yang harus didukung oleh ketertiban

dengan kapasitas hukum, peningkatan kemampuan dan juga kewibawaan dari pada aparaturnegara, pertumbuhan pada kreatifitas dan juga kegairahan kerja, partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertiban umum, masalah pajak dan pola hidup sederhana.

Dari uraian tersebut di atas, Suryadi (2000 : 2) menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat tetapi apabila inisiatif ini tidak datang maka di pergunakan teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar upaya kegiatan dan respon yang antusias terjamin.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa hal ini pembangunan itu meliputi pembangunan dalam arti material dan spiritual menyangkut berbagai dimensi hidup dan kehidupan masyarakat desa. Sering orang mengartikan pembangunan adalah sebagai keseluruhan usaha-usaha masyarakat tertentu yang menyangkut bidang fisik saja, misalnya mendirikan gedung, membuat jembatan dan sebagainya. Dan hal ini tidak disalahkan juga tetapi bagi suatu Negara seperti Indonesia, pembangunan di bidang fisik hanyalah merupakan salah satu sisi atau bagian dari pembangunan Nasional. Sebab pembangunan Nasional beda hakekatnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan baik yang menyangkut fisik maupun spiritual.

Untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru mengenai pembangunan, maka peneliti akan mengemukakan pendapat beberapa ahli

antara lain Siagian (2000 : 2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Tjokroamidjojo (2001 : 113) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Definisi Pembangunan Fisik Dan Pembangunan Non Fisik Di Dalam Kehidupan Masyarakat dikemukakan menurut B.S Muljana (2001:3) :

1. Pembangunan Fisik

Fisik dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti: (a) Jalan (b) Jembatan (c) Pasar (d) Pertanian dan (e) Irigrasi.

Kondisi fisik ini dapat berupa letak geografis, dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan didalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri.

Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana,

yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Sumber daya alam yang terdapat dimasing-masing desa. Dimana sebuah desa yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang banyak dari pada desa-desa lainnya, sehingga untuk mengembangkan atau dalam proses pembangunan desa akan jauh lebih baik dari pada desa yang sedikit mempunyai sumber daya alam, atau tidak ada sama sekali.

2. Pembangunan non fisik

Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi (2002:114) oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu :

- a. Pembangunan manusia
- b. Ekonomi
- c. Kesehatan
- d. Pendidikan.

Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun pembangunan antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik

mengedepankan sumberdaya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek saja, tetapi pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain.

Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan maupun kesejahteraan dalam bidang lainnya. Oleh karena itu peran manusia dalam pembangunan nonfisik perlu diperhatikan.

Usaha dibidang pembangunan non fisik dapat dijalankan dengan cara membimbing atau guiding, cara persuasi melalui telinga dan mata (audio visual), dan dapat dengan cara memberi stimulasi. Ketiga cara tersebut dilakukan agar masyarakat dapat tergugah untuk menimbulkan daya gerak serta dapat memberikan contoh konkrit pembangunan yang sebenarnya, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Kondisi non fisik terdiri dari atas aspek-aspek sosial budaya politik, dan religi. Aspek sosial budaya dalam arti sempit merupakan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang masih ditaati. Misalnya kegiatan gotong royong, yang merupakan kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.

Dimana gotong royong yang dilakukan sebuah desa tidak hanya terbatas pada kerja sama dibidang pertanian saja, tetapi juga mencakup bidang pembangunan rumah dan lain sebagainya. Itulah Teori pembangunan atau definisi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik didalam kehidupan masyarakat.

2.3 Tujuan Pemerintah

Tujuan fundamental suatu pemerintahan adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan.

Adapun beberapa tujuan pemerintahan menurut Merriam (1957:31) :

1. **Internal order** maksudnya memelihara dari dalam. Artinya pranata politik memelihara ketertiban dalam masyarakat dengan kewenangan yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif maupun dengan paksaan fisik.
2. **Eksternal security** maksudnya menjaga keamanan dari luar. Artinya pranata politik melalui alat-alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan negara dan warga masyarakat dari serangan pihak luar, baik melalui diplomasi maupun peperangan.
3. **General welfare** maksudnya berusaha melaksanakan kesejahteraan umum. Artinya pranata politik merencanakan, melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta kebutuhan pokok masyarakat seperti : sandang, pangan, papan, pendidikan, kesejahteraan, energi, komunikasi dan sebagainya.

4. **Justice (keadilan)** prinsip perlakuan yang adil, yang pemeliharaan atau administrasi apa yang terutama hanya dengan penyesuaian yang tidak memihak dari klaim yang saling bertentangan atau penugasan penghargaan atau hukuman yang pantas.
5. **Freedom** Suatu negara bersifat demokratis, ditandai dengan adanya kebebasan untuk kritik, pembentukan organisasi-organisasi yang bertindak atas dasar tanggung-jawab mereka sendiri, dan juga memberikan ruang yang lebar bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara terbuka dan bebas.

(1) **Pemerintah Pusat**

Pengertian Pemerintah Pusat yang turut dijelaskan dalam UU nomor 32 tahun 2004 adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat, yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Sebagai lembaga legislatif Pemerintah Pusat adalah DPR dan MPR. Pemerintahan ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, yang saat ini adalah DKI Jakarta.

(2) **Pemerintah Provinsi**

Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Kedudukan provinsi di Indonesia secara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Di

Pasal 18 disebutkan bahwa negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang tiap-tiap provinsi mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dengan undang-undang.

(3) Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot)

Disebut lengkap daerah kabupaten adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah terbatas tertentu. Kesatuan masyarakat ini berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Definisi seperti ini tertera didalam undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintah di daerah.

(4) Pemerintah Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995: 4).

Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

2.4 Cara Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kemukakan menurut Siagian, (2007, 106) :

1. Memberikan Motivasi Motivasi dalam hal pembangunan desa sangat diperlukan dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desanya. Seorang Kepala Desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menggerakkan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan itu tidak akan dapat terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Motivasi adalah sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
2. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan pelaksana fungsi manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama ke arah pencapaian tujuan. Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya

dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Kepala pembangunan yang dimaksud disini mencakup pembangunan fisik desa tersebut. Pembangunan fisik disini berupa pembangunan fasilitas-fasilitas maupun sarana dan prasarana yang ada di desa.

3. Pengawasan. Pengawasan ialah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kegiatan pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Di dalam pembangunan desa, kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pemerintah desa, tetapi juga dilakukan oleh seluruh masyarakat desa selaku pelaksana pembangunan.
4. Evaluasi Kegiatan evaluasi jika dikaitkan dengan pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan, karena kegiatan ini untuk mengetahui apakah pekerjaan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana sebelumnya atautkah belum. Kegiatan evaluasi juga penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam kegiatan pembangunan tersebut, dan apabila terjadi kekurangan-kekurangan maka akan diperbaiki untuk kesempurnaannya. Dengan kata

lain evaluasi adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir, atau dengan kata lain evaluasi ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999 : 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007 : 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999 : 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak social.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan

dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

(a) Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang

tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi. Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap

diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

(b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap

hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;

4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holih (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan

bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;

3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;

Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

2.5 Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari perkataan pemimpin *Leader* yang mempunyai pengertian sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Kartono Kartini (1990: 33). Jadi dengan kata lain pemimpin adalah seorang yang mempunyai kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, jugamendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapatmenggerakkan bawahannya kearah pencapaian tujuan tertentu.

Sementara kepemimpinan itu sendiri secara definisi adalah merupakan kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Kartini Kartono (1990: 38-39). Sedangkan

menurut Stoner kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh kepada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya, Bukhori, Muhammad, dkk (2005: 73) Sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencapai angka produktifitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di lain pihak Gibson dkk, mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut dengan penuh semangat berusaha mencapai tujuan, factor manusialah yang menggabungkan kelompok menjadi satu dan member motivasi kelompok itu menuju sasaran.

Kegiatan manajemen seperti merencanakan mengorganisasikan dan membuat keputusan adalah kepompong yang sedang tidur, sampai seorang pemimpin memicu kekuatan motivasi dalam diri orang-orang dan membimbing mereka ke arah sasaran, Gibson dkk (1997: 3) pekerjaan serta tanggung jawan atas kepemimpinannya tersebut dengan baik, Robert C. Miljus dalam bukunya Human Relation On The Shop Flor mengemukakan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis (dalam artian kuantitas, kualitas, keamanan dan lain sebagainya).
- b. Melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- c. Mengkomunikasikan kepada karyawannya tentang apa yang diharapkan dari mereka.

- d. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong motivasi prestasi karyawannya.
- e. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan.
- f. Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan yang efektif.
- g. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya.
- h. Menunjukkan perhatian kepada seluruh karyawannya.

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan (*Leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya). Sehingga orang lain tersebut bertingkah-laku sebagaimana menghendaki oleh pemimpin tersebut. Kadangkala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial (Koentjaraningrat, 1967:181). Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai salah satu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 1990: 318-319).

Menurut Cooley (1902), *The leader is always the nucleus of tendency, and on the other hand, all social movement, closely examined will be found to consist of tendencies having such nucleus.*

Maksudnya, pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.

Bagi setiap lembaga organisasi kepemimpinan yang efektif adalah merupakan kunci keberhasilan. Menurut Wahjosumidjo (2003: 83) dalam praktek organisasi kata memimpin mengandung konotasi : “menggerakkan, mengarahkan, membina, melindungi, memberi teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan dan sebagainya”.

Dari kata tersebut dapat dirumuskan memimpin mengandung makna yang luas yaitu “Kemampuan untuk menggerakkan segala sumber daya yang ada sehingga dapat didaya gunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupu nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain.

Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata itulah, kemudian muncul istilah kepemimpinan setelah melalui proses yang panjang. Masalah kepemimpinan sama tuanya dengan sejarah manusia. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Apakah orang-orang dalam masyarakat atau organisasi tidak

dapat menjalankan tugas atau fungsinya tanpa adanya seorang pemimpin? Pemimpin diperlukan, sedikitnya terdapat empat macam alasan:

- a. Karena banyak orang memerlukan figur pemimpin.
- b. Dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya.
- c. Sebagai tempat pengambilan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya dan.
- d. Sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.

Pengertian kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar kelompok atau organisasi.

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu sukarela/sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat

menggerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.

Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal yaitu:

- a. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut.
- b. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya.
- c. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Oleh karena itu, kepemimpinan itu pada hakikatnya adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama, kepemimpinan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan, melibatkan tiga hal yaitu, pemimpin, pengikut dan situasi tertentu, kemampuan untuk

mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan sumber pengaruh dapat secara formal maupun tidak formal.

Konsep kepemimpinan erat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh alat untuk memengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, referensi, informasi, dan hubungan. Pada dasarnya kemampuan untuk memengaruhi orang atau suatu kelompok untuk mencapai tujuan tersebut ada unsur kekuasaan.

Kekuasaan tak lain adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya. Praktik kepemimpinan berkaitan dengan mempengaruhi tingkah laku dan perasaan orang lain baik secara individual maupun kelompok dalam arahan tertentu, sehingga melalui kepemimpinan merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi orang atau ide-idenya.

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah Saw. wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan amir (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal.

2. Teori kepemimpinan

Pada umumnya teori kepemimpinan berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai pemimpin dengan mengemukakan beberapa segi, salah satunya adalah teori perilaku (behaviour theory). Teori ini bertolak dari pemikiran bahwa kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi tergantung pada perilaku atau gaya bersikap dan gaya bertindak seorang pemimpin. Dengan demikian teori ini memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi kepemimpinannya. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah, memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mengendalikan dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi, cara memimpin rapat dan cara pemberian sanksi/hukuman.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pendekatan teori perilaku melalui gaya kepemimpinan merupakan yang memiliki orientasi yang terdiri dari:

- a. Orientasi pada tugas
- b. Orientasi pada tugas dan barang

2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kepemimpinan menurut UU

Nomor 6 Tahun 2014

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dan sekaligus faktor kekuatan upaya pemerintah Desamendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa adalah hal ini disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, pemerintah Desa diberikan kewenang penuh untuk mengurus pemerintahan Desa.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat upaya pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, yakni pendidikan yang masih rendah, hal ini mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pembangunan menjadi minim, Sarana dan Prasarana, faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa. Sarana dan Prasarana yang harus cukup memadai baik dari segi jumlahnya, dari segi kualitasnya dan praktis dari segi penggunaannya, syarat-syarat sarana dan prasarana semacam ini lah yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, Keuangan, faktor ini adalah tulang punggung bagi terselenggaranya aktifitas Pemerintah Desa. Salah satunya ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan dalam bidang keuangan. Karena itu kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2011 : 205), Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Peneliti akan meneliti selama 3 bulan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat karena peneliti pernah KKN (Kuliyah Kerja Nyata) selama 2 bulan dan tepatnya di Kantor Desa Batulayar. Selama KKN, saya memantau bahwa tingkat partisipasi dan gotong royong masyarakat sangat meningkat terutama dari pembangunan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3.3 Penentuan Informan/ Responden

Peneliti akan menggunakan teknik *Purposive sampling* dan *Snowball sampling* sehingga terdapat informan kunci dan informan pendukung.

Menurut Sugiono (2011:244), *Purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan pada kemampuan informan untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada penulis. Menurut Sugiono (2011:245), *Snowball sampling* adalah teknik penentuan informan dengan mula-mula menentukan informan dalam jumlah kecil, kemudian membesar jika informan yang telah dipilih belum memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan penelitian adalah Kepala Desa, Staf-staf desa, Kepala Dusun, dan Masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu yang lebih memahami terhadap fenomena atau gejala sosial karena sifatnya masyarakat yang menjadi subjek.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer bersumber dari berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak dijadikan informan penelitian. Para pihak yang dijadikan informan penelitian adalah Kepala Desa, Staf-staf desa, Kepala Dusun.

2. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari berbagai dokumen dalam bentuk tulisan, buku, literatur, artikel, maupun dari situs internet dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiono (2011 : 224), pengamatan dilakukan untuk mencegah adanya keraguan pada peneliti, apakah data yang dijangkau terdapat kekeliruan atau bias. Pengamatan ini juga membantu penelitian pada saat teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan. Teknik ini digunakan untuk mengamati Peran Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemulihan pembangunan pasca gempa.

2. Wawancara

Menurut Sugiono (2011 : 231), wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu antara pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai Peran Kepala desa dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemulihan pembangunan pasca gempa.

Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen sangat penting untuk keperluan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong. Dokumen juga sebagai bukti untuk suatu pengujian.

Menurut Sugiono (2011 : 240), teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai bagaimana Peran Kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemulihan pembangunan pasca gempa.

4. Angket

Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.

Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2007 : 163) terkait dengan prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah dari lapangan. Menurut Sugiono (2011 : 247), untuk itu perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dan dapat menjawab pertanyaan. Setelah melakukan pemilihan data, selanjutnya data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan diperlukan dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

2. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Menurut Sugiono (2011 : 249), Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci, maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiono (2011 : 253), setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

